

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan atas pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan selama satu tahun anggaran. Laporan keuangan itu sendiri berfungsi untuk menyajikan informasi yang terkait dengan posisi keuangan, arus kas, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang dapat dimanfaatkan bagi para pengguna untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan biasa diaudit oleh BPK dan biasanya hasil audit tersebut berupa opini WTP (wajar tanpa pengecualian), WDP (wajar dengan pengecualian), TMP (tidak menyatakan pendapat). Di kabupaten Penukal Abab Selandi bisa dikatakan kabupaten dengan tingkat pencapaian yang cukup baik, pasalnya semenjak dibentuk kabupaten tersebut terus menunjukkan peningkatan hasil laporan keuangan tersebut. Berikut tabel hasil audit kabupaten PALI dari tahun 2014-2019.

Tabel 1.1
Hasil Audit Kabupaten Pali

Tahun	Hasil Audit
2014	TMP
2015	WDP
2016	WTM
2017	WDP
2018	WTP
2019	WTP

Sumber : Data yang diolah, 2020

Meskipun hasil audit yang ditema oleh kabupaten tersebut WTP akan tetapi masih banyak kejanggalan yang terjadi di desa yang terdapat di Kabupaten tersebut. Di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sendiri masih banyak di temukan beberapa kelemahan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan yaitu sebanyak 47 desa di kabupaten Penukal Aabab Lematang Ilir (PALI) yang belum menyampaikan LPJ APBDES, terdapat dua kecamatan yang belum melaporkan LPJ Dana Desa tahun 2018, dan tertangkapnya kades Desa Panta Dewa karena dugaan Selewengkan Dana Desa dan masih banyak Di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sendiri masih banyak di temukan beberapa kelemahan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan yaitu sebanyak 47 desa di kabupaten Penukal Aabab Lematang Ilir (PALI) yang belum menyampaikan LPJ APBDES,

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, danaudit keuangan daerah terhadap keandalan pelaporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan oleh Nasution (2019), berkesimpulan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Sari (2017), yang berkesimpulan bahwa sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan pengendalian intern akuntansi dan pengaruh sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi

terhadap keandalan yang dilakukan oleh Fransiska (2015), yang berkesimpulan bahwa pengendali intern akuntansi dan pengaruh sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintahan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan pemerintahan Faktor yang pertama mempengaruhi pelaporan keuangan adalah sumber daya manusia. sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai dan karyawan (Fransiska, 2015). sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, setiap organisasi pemerintah harus memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang memadai yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, atau mempunyai pengalaman di bidang keuangan, sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang memiliki kapasitas memadai akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami logika akuntansi disebabkan karena sumber daya manusia tidak dibekali dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman di bidang keuangan, hal tersebut berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Yosefrinaldi dalam Elvin Andrianto, 2017).

Faktor kedua yang juga mungkin dapat mempengaruhi keandalan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Jadi keterlibatan kerja yang tinggi berarti pemihakan seorang pada pekerjaannya yang khusus, dan komitmen organisasi yang tinggi berarti pemihakan pada organisasi yang mempekerjakannya. Dengan demikian adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Fransiska, 2015).

Komitmen Organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pegawai atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pegawai membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Oleh karena itu, Komitmen Organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi pegawai terhadap organisasi. Jika pegawai merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasi yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan (Ratifah dan Ridwan dalam Andrianto 2017).

Faktor ketiga yang juga mungkin dapat mempengaruhi keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan dalam bidang teknologi informasi. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam mengembangkan dan

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang nantinya diguna untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah yang telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Seperti yang kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (dalam Zuliarti, 2012).

Selain pemanfaatan teknologi faktor yang juga berkemungkinan dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern sangatlah penting bagi organisasi dibidang bisnis ataupun organisasi dibidang pemerintah, karena salah satu tujuan dari sekian banyak tujuannya adalah untuk menyelamatkan aset organisasi tersebut.

Pengendalian intern menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian

tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zuliarti, 2012).

Pengelolaan keuangan daerah telah memasuki era reformasi, reformasi pengelolaan keuangan daerah antara lain menyangkut pendekatan atau metode di dalam penganggaran, akuntansi, pelaporan keuangan, dan pola pertanggungjawaban (Nasution, 2019). Reformasi pengelolaan keuangan daerah tersebut memaksa terbitnya peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditandatangani oleh Presiden yang mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah menerapkan SAP berbasis akrual per 1 Januari 2015 (Nasution, 2016). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini berbeda dengan standar akuntansi yang ada di perusahaan swasta, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini tidak berfokus pada pada pencarian laba, bertolak belakang dengan sistem akuntansi yang ada di perusahaan swasta yang tujuan utamanya adalah mencari laba.

Terbitnya aturan tersebut membawa perubahan terhadap pengelolaan keuangan daerah kearah yang lebih baik lagi terhadap pelaporan keuangan pemerintah. Pelaporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik

menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam pelaporan keuangan. Fungsi informasi dalam pelaporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu. Keandalan informasi pelaporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP serta merupakan unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya tentu masih belum dapat dikategorikan sempurna, masih terdapat kendala-kendala yang harus diperbaiki di dalamnya khususnya masalah akuntansi yang pada situasi tertentu akan menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah seperti implementasi SAP berbasis akrual yang merupakan kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan pada pengelolaan keuangan negara saat ini (Nasution, 2018)

Dalam dunia pemerintahan, laporan keuangan adalah salah satu hal yang sangat penting sebagai bahan pertimbangan guna memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan untuk mengetahui hasil-hasil apa saja yang telah dicapai oleh pemerintah tersebut dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Bukan hanya pemerintah pusat yang membuat laporan keuangan, akan tetapi pemerintah daerah, kota, atau provinsi beserta seluruh badan dinas dan instansi pun harus mampu membuat laporan keuangan.

Salah satu dasar yang sangat penting yang sering digunakan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik adalah laporan keuangan oleh karena itu laporan yang di sajikanpun harus dapat diandalkan. Untuk mewujudkan keuangan yang andal, informasi yang didapat harus di paparkan secara wajar dan bebas dari salah saji material, agar tidak menyesatkan dalam pembacaan dan penggunaan laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang membahas tentang laporan keuangan menyatakan bahwa didalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian/istilah yang menyesatkan dan kesalah material, menyajikan laporan keuangan secara fakta dan jujur, dapat diverifikasi, dan tidak memihak pada suatu kebutuhan pihak tertentu. Informasi yang disajikan mungkin saja relevan akan tetapi jika dalam penyajian tidak dapat diandalkan maka dapat berpotensi menyesatkan bagi para pembaca.

Wujud pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan publik adalah berupa keandalannya laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan merupakan salah satu unsur nilai yang penting terkait dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan, paragraf 35-40 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatra Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Talang

Ubi. Penukal Abab Lematang Ilir merupakan DOB (daerah otonomi baru) hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang disahkan tanggal 11 Januari 2013 melalui UU no 7 tahun 2013, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dibagi menjadi 5 kecamatan, antara lain: Abab, Penukal, Penukal Utara, Talang Ubi, Tanah Abang. Kecamatan Abab terdiri dari beberapa Desa yaitu Betung, Betung Barat, Betung Selatan, Karang Agung, Pengabuan, Pengabuan Timur, Prambatan, Tanjung Kurung. Kabupaten Penukal terdiri dari beberapa desa yaitu: Air Itam, Air Itam Timur, Babat, Gunung Menang, Gunung Raja, Mangku Negara, Mangku Negara Timur, Purun, Purun Timur, Raja Jayal, Spantan Jaya, Suka Raja, Sungani Langan. Kecamatan Penukal Utara terdiri dari beberapa desa yaitu Karang Tanding, Kota Baru, Lubuk Tumpai, Muara Ikan, Prabu Menang, Sukarami, Tambak, Tanding Marga, Tanjung Baru, Tempirai, Tempirai Selatan, Tempirai Utara, Tempirai Timur. Kecamatan Talang Ubi terdiri dari beberapa desa yaitu Benakat Minyak, Benung, Beruge Darat, Karta Dewa, Panta Dewa, Semagus, Simpang Tais, Sinar Dewa, Suka Damai, Suka Maju, Suang Buang, Sungai Ibol, Talang Akar, Talang Bulang. dan kecamatan Tanah Abang terdiri dari beberapa desa yaitu: Bumayu, Curup, Harapan Jaya, Lunas Jaya, Modong, Muara Dua, Muara Sungai, Pandan, Raja, Raja Barat, Sedupi, Suka Manis, Suka Raja, Tanah Abang Jaya, Tanah Abang Selatan, Tanah Abang Utara dan Tanjung Dalam.

Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan dari fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Laporan Keuangan Pemerintahan Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)”**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian yaitu:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan?
2. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kandalan laporan keuangan?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diaatas, maka secara rinci tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan
2. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan
3. Untuk mengetahui apakah sistem pengendali intern berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan
4. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap laporan keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui apakah sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, sistem pengendali intern, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai apakah sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, sistem pengendali intern, komitmen organisasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

- b. Bagi Pemertintah

Dapat dijadikan dasar acuan untuh meningkat kualitas laporan keuangan pemerintahan.

- c. Bagi Almamater

Dapat dijakakan sebagai reverensi dan keraangka berfikir untuk penelitian selanjutnya di bidang akuntansi.